



# BKKBN Kucurkan Rp 5,9 Miliar untuk Bengkulu

## Upaya Percepatan Penurunan Stunting

**BENGKAYANG, SP** - Dalam upaya percepatan penurunan stunting, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengucurkan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) bagi pemerintah daerah (Pemda). Pemerintah Kabupaten Bengkulu bagian kucuran BOKB sebesar Rp 5,9 miliar pada 2023.

Hal tersebut disampaikan Pelaksana tugas (Plt) Kepala Perwakilan (Kaper) BKKBN Provinsi Kalbar, Aulia Arfiansyah Arief usai melakukan audiensi dengan Bupati Bengkulu, Sebastianus Darwis pada Selasa (7/6).

Aulia mengungkapkan anggaran yang dikucurkan BKKBN tersebut ditujukan untuk membentuk sumber daya manusia (SDM) yang unggul. Terutama dalam upaya percepatan penurunan kasus stunting. Sehingga diharapkan penyerapan anggaran BOKB oleh Pemda bisa maksimal.

"Kami terus berupaya mendorong Pemda melalui kepala daerah untuk segera merealisasikan kegiatan untuk menyerap anggaran yang sudah kita alokasikan," ucap Aulia.

Dirinya menambahkan secara kewenangan penguku-



SUARAPEMRED/  
NARYATI  
**KUCURKAN BOKB - BKKBN** mengucurkan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) bagi Pemerintah Kabupaten Bengkulu sebesar Rp 5,9 miliar pada 2023.

naan anggaran BOKB sudah secara penuh diberikan kepada pemerintah daerah. Sehingga menurutnya

**Aulia Arfiansyah Arief**  
PltKaper BKKBN Provinsi Kalbar

Kita berharap realisasi dan serapan BOKB yang telah dikucurkan BKKBN bisa maksimal.

### Optimis Serap BOKB

**BUPATI** Bengkulu, Sebastianus Darwis mengungkapkan rasa optimisnya akan penyerapan BOKB bisa semakin lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Terlebih dengan rotasi yang dilakukan pada jajaran Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Ka-

bupaten Bengkulu. Sehingga dirinya yakin kendala kinerja yang stagnan pada tahun lalu bisa diperbaiki, terutama dalam penyerapan BOKB yang telah dikucurkan untuk Kabupaten Bengkulu. "Saya yakin pak Kabid

yang baru tidak takut-takut. Saya yakin serapan BOKB Bengkulu akan lebih baik di tahun mendatang," ungkap Darwis.

Disamping itu, menurut Aulia, jika anggaran BOKB tidak maksimal diserap juga akan membuat pemerintah

daerah menjadi rugi. Lantaran sisa anggaran yang ada akan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

"Kita berharap realisasi dan serapan BOKB yang telah dikucurkan BKKBN bisa maksimal," jelasnya. (nar)

egis dalam upaya percepatan penurunan stunting. Diantaranya dengan sinkronisasi OPD yang terlibat mendukung percepatan penurunan stunting oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). (nar)